

# BAB I.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan atau makanan merupakan bagian dari kebutuhan utama makhluk hidup secara umum, karena makanan merupakan sumber energi bagi setiap makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang berada di berbagai Negara berhak untuk mendapatkan pangan yang layak tanpa terkecuali, hal ini termasuk juga hewan maupun tumbuhan. Namun, berbeda cerita apabila seseorang mengalami kelaparan dan yang disebabkan oleh terjadinya krisis pangan, yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti sulitnya mendapatkan sumber makanan yang baik dan layak, hal ini ternyata telah menjadi permasalahan yang selalu terjadi diberbagai belahan dunia, meskipun penyebab terjadinya kelaparan atau krisis pangan tersebut berbeda-beda.

Menurut LSM *International Trust Organization* menyebutkan terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya krisis pangan yakni **Kemiskinan** yang berarti seseorang tidak mampu untuk membeli makan untuk dirinya sendiri, **Bencana alam** seperti misalnya kekeringan ataupun banjir dan tanah longsor, **Konflik** yang dapat mendorong seseorang tidak dapat berada di dekat sumber pangan seperti perang (Hariani, 2017, pp. 1-2). Terdapat juga faktor lain seperti munculnya penyebaran penyakit mematikan yang menyerang suatu wilayah atau negara yang membuat seseorang tidak dapat melakukan pekerjaannya. Salah satu contoh Negara yang mengalami krisis pangan akibat dari penyebaran penyakit yakni misalnya saja Negara Sierra Leone.

Dalam mengatasi krisis pangan ataupun kelaparan yang ada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan badan khusus yang dikenal dengan *Food*

*and Agriculture Organizations* (FAO). FAO sendiri merupakan organisasi antar pemerintah atau *Intergovernmental Organizations* yang memiliki sekitar 194 negara anggota, dan bekerja di lebih dari 130 negara yang ada di seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan kelaparan yang ada di berbagai Negara. Tujuan dari adanya FAO ini adalah untuk mencapai ketahanan pangan bagi semua dan juga memastikan bahwa semua orang berhak memiliki akses makanan yang berkualitas tinggi agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik dan sehat. FAO ini memiliki sekitar 194 negara anggota, dan bekerja di lebih dari 130 negara yang ada di seluruh dunia (FAO, n.d.).

FAO melakukan berbagai cara untuk menciptakan dan membagikan informasi yang dianggap penting tentang pangan, pertanian maupun sumber daya alam dalam bentuk barang public global, organisasi ini juga berperan sebagai penghubung, melalui cara pengidentifikasian dan bekerja dengan berbagai mitra yang berbeda dan memiliki keahlian yang mapan, bahkan FAO memfasilitasi dialog bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan mereka yang sedang membutuhkan. FAO memfasilitasi kemitraan untuk mewujudkan keamanan pangan dan gizi, pertanian dan pembangunan bagi pedesaan antara pemerintah, mitra pembangunan, masyarakat sipil dan berbagai sektor swasta (FAO, 2019).

Di Sierra Leone sendiri, FAO memberikan bantuan yang berfokus pada tiga bidang prioritas yakni Dukungan untuk Program Komersialisasi Petani Kecil (SCP); Pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam; Pengurangan dan manajemen risiko bencana. Dukungan utama berfokus pada pembangunan kapasitas manusia dan kelembagaan yang nantinya bertujuan untuk mencapai keamanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta ketahanan

terhadap krisis dan bencana. Dalam menangani krisis yang terjadi di Sierra Leone, FAO menjembatani Negara Sierra Leone dengan *World Food Programme* (WFP).

WFP merupakan sebuah organisasi kemanusiaan terkemuka yang dibuat untuk menyelamatkan jiwa serta mengubah hidup masyarakat yang membutuhkan, bantuan yang diberikan berupa makanan dalam keadaan darurat dan organisasi ini bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan nutrisi dan membangun ketahanan. WFP sendiri berdiri pada tahun 1961 yang bermarkas di New York. Disini rupanya masyarakat Internasional berkeinginan kuat ataupun berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat yang ada diberbagai Negara pada tahun 2030 mendatang (WFP, n.d.). WFP sendiri didanai oleh pemerintah maupun pribadi secara sukarela yang berasal dari Negara anggota, yang mana sebagian besar anggotanya terdiri atas Negara maju dan terdapat pula sumbangan pribadi dari perusahaan/pengusahaan (Hariani, 2017, pp. 2-3).

WFP telah membantu 80 juta jiwa yang ada di sekitar 80 negara setiap tahunnya. Menurut WFP, masyarakat Internasional telah memiliki komitmen untuk mengakhiri masalah kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta memperbaiki gizi pada tahun 2030 mendatang, bahkan menurut WFP satu dari sembilan orang yang ada di seluruh dunia masih belum cukup makan. WFP memiliki 5.000 truk, 20 kapal bahkan 92 pesawat bergerak guna mengirimkan makanan dan bantuan lain kepada mereka yang paling membutuhkan dengan berbagai keadaan darurat. WFP juga tidak hanya memberikan bantuan pangan namun juga membantu masyarakat di setiap Negara untuk membangun kembali kehidupan yang hancur dan penghidupannya (WFP, n.d.).

WFP sendiri sebenarnya sudah ada di Sierra Leone sejak tahun 1968 dan sudah pernah menangani kasus krisis pangan yang terjadi di Negara tersebut pada tahun 1999. Krisis pangan yang terjadi di Sierra Leone saat itu merupakan krisis yang diakibatkan oleh adanya perang sipil yang mengakibatkan perekonomian Negara anjlok, dan sulitnya masyarakat Sierra Leone untuk mendapatkan makanan dari luar karena adanya perang tersebut membuat mereka jauh dari tempat pasokan makanan normal, perang tersebut juga membuat masyarakat Sierra Leone merasa takut dan tidak berani keluar dari tempat persembunyian mereka (Hariani, 2017, p. 2).

Pemerintah Sierra Leone yang dibantu oleh WFP berusaha untuk mengembalikan kembali kehidupan masyarakat Sierra Leone, yang mana programnya berfokus kepada program pengembangan pelayanan masyarakat. Tahun 2007, WFP membuat program yang digunakan untuk mengatasi permasalahan Sierra Leone pada kala itu yakni *Protected Relief and Recovery Operation* (PRRO) yang berfokus pada pembangunan kembali mata pencaharian masyarakat dan memberikan kemudahan akses terhadap makanan dan pelayanan sosial, yang kemudian dijalankan pada tahun 2009 (Hariani, 2017, p. 3).

Perekonomian Negara tersebut kemudian mulai membaik dan sempat meningkat pada tahun 2013, akan tetapi Sierra Leone kemudian mengalami krisis pangan kembali pada tahun 2014 ini yang disebabkan oleh perekonomian Negara yang anjlok kembali, pada 2013 PDB Negara mencapai 21%, yang kemudian melambat pada tahun 2014 akibat adanya *Ebola Virus Disease* (AFDB, 2018). Sierra Leone sendiri merupakan Negara yang terletak di wilayah Afrika bagian Barat tepatnya di pesisir Samudra Atlantik yang posisinya berada di sebelah Barat daya Negara Sierra Leone, dan berbatasan dengan Negara Guinea di sebelah Utara dan Negara

Liberia di sebelah Tenggara. Jumlah penduduk Sierra Leone yakni sekitar 7.396.160 jiwa pada tahun 2014. Populasi Sierra Leone masih terbilang muda, yang hampir setengah dari penduduk negara tersebut berusia di bawah 15 tahun (RSWR, Sierra Leone). Perekonomian Sierra Leone sebagian besar berasal dari pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan), yang mana 65% penduduk Sierra Leone hidupnya tergantung pada sektor pertanian ini, karena sektor pertanian ini dianggap sebagai sektor yang sangat penting di Negara tersebut. Beras dan singkong adalah bahan pokok utama, sementara coklat, kopi, kelapa sawit dan juga jambu mete merupakan tanaman utama. Sektor pertanian di Negara Sierra Leone sendiri terkendala oleh faktor-faktor yang termasuk didalamnya yakni kurangnya input yang diperbaiki, dan adanya penurunan kesuburan tanah, telah merusak pembangunan pertanian yang ada di Negara ini (USAID, 2018).

Pada tahun 2011, Negara Sierra Leone menempati peringkat rendah dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu peringkat 180 dari 187 negara, dan 60% lebih penduduk di Negara tersebut hidup dengan upah sebesar US\$ 1,25 per hari, dengan tingkat buta huruf dan pengangguran yang tinggi dikalangan para pemudanya (UNDP, n.d.). Hal ini menyatakan bahwa mereka mengalami ketidakamanan pangan.

Krisis pangan kembali yang terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan oleh Virus Ebola. Penyakit ini, sebelumnya dikenal sebagai *Ebola haemorrhagic fever*, yang mana merupakan penyakit parah dan akibatnya sering fatal pada manusia. Virus ini diperkirakan berasal dari kelelawar buah dari keluarga *Pteropodidae* yang merupakan host virus Ebola alami, yang kemudian virus ini mengkontaminasi melalui hewan yang terkontaminasi seperti kelelawar buah, monyet, simpanse, dll. Penyakit ini menyebar melalui adanya

penularan dari manusia kepada manusia melalui kontak secara langsung, melalui darah dan cairan dalam tubuh manusia misalnya saja seperti keringat yang menempel pada pakaian atau tempat tidur. Bahkan petugas kesehatan yang menangani pasien virus ebola sudah sering terinfeksi, hal ini akibat dari adanya kontak fisik yang dekat dengan pasien ketika mereka melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi tersebut (WHO, 2018).

Di Afrika Barat sendiri, virus ini telah kembali merebak setelah empat dekade terakhir, yang disebabkan oleh kelelawar pemakan buah yang berasal dari hutan Guinea, kemudian menyebar hingga Liberia dan Sierra Leone, yang mana kelelawar buah (daging hewan semak) merupakan salah satu sumber makanan mereka (Nindiati, 2016).

Virus ebola ini menyebar melalui urine, muntahan, diare, keringat, dan sebagainya. Akibatnya masalah penyakit ini sudah bukan lagi permasalahan yang hanya dapat diselesaikan di antara Negara Negara di Afrika Barat saja, namun sudah menjadi sebuah perhatian masyarakat internasional. Ebola yang menyerang tiga Negara di Afrika Barat pada tahun tersebut, menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) hal ini menyebabkan ketiga Negara tersebut berpotensi mengalami kehancuran (Sari, 2014).

Adanya ancaman *Ebola Virus Disease* (EVD) ini telah meningkat di Afrika Barat terutama di ketiga Negara tersebut. Banyak strategi dari pemerintah domestik dari ketiga Negara telah dilakukan untuk mengendalikan virus yang mematikan tersebut, seperti misalnya pemerintah Liberia menutup perbatasan wilayahnya dengan Sierra Leone (Yani, 2015). Pemerintah Sierra Leone memberlakukan *Operation Western Area Surge* sebagai upaya mengendalikan virus (BBC, 2014). Pemerintah Guinea memberlakukan isolasi terhadap pasien rumah sakit yang terkena ebola

dan larangan bagi warga untuk mendatangi pemakaman warga yang terinfeksi ebola, keduanya dilakukan agar mengurangi penularan penyakit ebola. Selain itu, ketiga Negara memberlakukan pula strategi dalam penciptaan zona karantina.

Masalah ini semakin memburuk, pasalnya upaya pemerintah domestik ketiga Negara menimbulkan ruang gerak mereka terbatas, yang kemudian berdampak pada akses makanan, harga, dan panen. Pembatasan ruang gerak ini berdampak pada sistem perdagangan yang telah menciptakan lonjakan harga dan membuat panik penduduk, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka (Foodtank, 2014). Dan adanya masalah pada sistem kesehatan di Guinea, Liberia, maupun Sierra Leone dianggap tidak ataupun belum siap dalam menghadapi wabah ebola tersebut, yang mana ketiga Negara tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti obat-obatan, ambulans, fasilitas kesehatan dan sebagainya (Romadona, 2015). Pada akhir Februari 2015 *United Nation Development Group* (UNDG) menyatakan bahwa setidaknya 22.859 jiwa telah terkena virus ebola tersebut dan sekitar 9162 jiwa meninggal (Romadona, 2015).

Menurut Dr. Bruce Aylward yang merupakan seorang asisten Dirjen Operasi Darurat WHO mengatakan bahwa kasus ebola pada tahun 2014 tersebut merupakan kasus ebola yang terparah dalam sejarah dari kasus penyebarannya (VOA, 2014). Pada bulan Mei 2014, WHO Afrika menambahkan bahwa Sierra Leone memiliki kasus pertama setelah adanya seorang wanita dites positif setelah ia kembali ke rumahnya dari pemakaman di Guinea, kemudian virus tersebut terus menyebar. Sierra Leone merupakan salah satu Negara yang terkena EVD yakni sekitar 8.706 orang terinfeksi oleh penyakit tersebut dengan total kematian 3.590 orang (WHO, n.d).

FAO menambahkan bahwa Negara Sierra Leone terdapat 7.897 kasus pada bulan desember 2014, dan petani di Negara Sierra Leone yang seharusnya mendapatkan hasil panen melimpah, namun akibat dari adanya pembatasan ruang gerak yang diberikan untuk meminimalisir penyebar virus ebola, mereka mengalami penurunan angka hasil panen yang pada tahun tersebut (Ahmed & Husain, 2014).

Tidak hanya sampai disitu saja, meskipun penyebaran virus ebola di Sierra Leone berakhir pada tahun 2015, namun akibatnya masih tetap ada, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten yang terdapat di Sierra Leone seperti kabupaten Kailahun, Kambia, Port Loko, Pujehun, dan Tonkolili memiliki tingkat kerawanan pangan tertinggi. Wabah ebola tersebut menyebabkan penurunan ketahanan pangan terutama di wilayah kabupaten Kailahun dan Kenema, menjadikan pangan sebagai masalah yang dianggap kronis, hal ini disebabkan karena faktor struktural yang mempengaruhi sistem produksi pangan dan hal ini juga yang membatasi kemampuan rumah tangga dalam menghasilkan ataupun membeli makanan yang cukup (Thomas A. R., 2016).

Sierra Leone sebagai salah satu Negara penghasil pangan, menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyebutkan bahwa wilayah Kailahun lah yang menjadi wilayah dengan angka kematian tertinggi di Negara tersebut, dan hal ini menyebabkan terjadinya krisis buruh tani di wilayah tersebut, sebab Kailahun merupakan wilayah penghasil pangan dan menjadikan harga pangan di pasar yang melonjak drastis. Sierra Leone merupakan salah satu Negara di Afrika Barat yang dilanda wabah penyakit ebola terparah (Movanita, 2014).

Ebola ini telah menimbulkan masalah yang serius dan dirasa dapat sangat merugikan bagi Negara Sierra Leone terutama dari segi pangan yang diakibatkan oleh adanya lonjakan harga yang terjadi di



zona perdagangan. Karena hal tersebut Presiden Ernest Bai Koroma memerintahkan untuk dilaksanakannya sebuah operasi yang disebut “*Operation Western Area Surge*” yang dilakukan untuk memeriksa ke setiap rumah di wilayah Ibukota Sierra Leone yakni Freetown untuk mencari adanya kemungkinan dari kasus tersebut (BBC, 2014). Namun yang terjadi mengakibatkan para pekerja dalam operasi tersebut menjadi tertular dan jumlah warga yang tertular meningkat jumlahnya.

Meskipun Sierra Leone memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup dan diyakini memiliki prospek ekonomi yang cerah juga Negara ini dinilai bahwa angka kemiskinan dapat mengalami penurunan. Namun prospek ini menurun atau tidak terjadi demikian karena adanya wabah ebola yang menyerang Negara tersebut, yang mana hal ini membuat peningkatan kerawanan pangan dan adanya kekurangan gizi yang meningkat di Sierra Leone ini (Romadona, 2015). Menurut Nyabenyi Tipo yakni seorang perwakilan FAO di Sierra Leone mengatakan bahwa ketidakamanan pangan terdapat pada rendahnya produktivitas pertanian, kemiskinan, dan kurangnya ketahanan Negara tersebut (Taylor, 2016).

Abass Kamara yang merupakan Koordinator program Jaringan Sierra Leone tentang Hak atas Pangan (SiLNoRF) mengatakan bahwa sebenarnya Negara Sierra Leone tidak terlalu mengalami kekurangan pangan, karena masih ada pangan yang diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama wabah ebola tersebut menyerang, namun ia juga mengatakan bahwa adanya ketidak mampuan untuk membeli yang dialami oleh masyarakat Sierra Leone sendiri merupakan tantangan utama yang dialami masyarakatnya tersebut, termasuk masyarakat kabupaten Bombali dan Tonkolili. Abass Karama juga menambahkan bahwa rendahnya aktivitas pertanian merupakan masalah yang dianggap serius di hadapi

kabupaten Bombali dan Tonokili. Banyak dari masyarakatnya atau warganya yang meninggalkan lahan pertanian mereka untuk kegiatan lain seperti penambangan ataupun sewa permukaan yang dibayarkan oleh perusahaan pertambangan yang bahkan ia juga berkata bahwa hal itu bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka selama seperempat tahun, namun hal tersebut bukanlah satu satunya alasan tantangan yang muncul bagi masyarakat di kedua kabupaten tersebut (Sesay, 2016).

Dalam menangani masalah ebola tersebut Presiden Sierra Leone saat itu yakni Ernest Bai Koroma, membuat sebuah kebijakan baru yang mana kebijakan ini memerintahkan warganya untuk tidak keluar dari rumah mereka selama empat hari untuk megurangi adanya penyebaran penyakit ebola tersebut (Nindiati, 2016). Dan membentuk sebuah kebijakan yang dianggap ekstrem yakni dengan memberlakukan jam malam kepada dua kabupaten di Negara tersebut yakni di Kambia dan Port Loko yang disampaikan melalui salah satu siaran televisi di Sierra Leone.

*“I have instructed the security to institute chieftdom-level curfew and restriction on movement from 6pm to 6am in Kambia and Port Loko districts, with immediate effect”*  
(Aljazeera, 2015).

Kebijakan ini dilakukan pemerintah Sierra Leone guna melindungi warganya dan untuk meminimalisir wabah tersebut.

Sierra Leone yang merupakan Negara yang paling tinggi dalam penyebaran virus ebola tersebut dipandang oleh PBB dan bahkan FAO, sebagai sebuah ancaman yang dapat mengancam kehidupan Negara tersebut dan bahkan mengancam kebahagiaan anak anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan menjadikan mereka yatim piatu atau kehilangan tempat tinggalnya, meskipun beberapa anak bisa diadopsi, namun tidak

semua merasa bahwa keluarga baru dapat menggantikan segalanya, dan mereka merasa bahwa ancaman ebola akan terus mengejar mereka. Wabah ini tidak segan membuat banyak buruh tani yang meninggal karenanya, sehingga tidak ada yang bercocok tanam dan tidak ada cara mereka untuk menghindari kontak fisik ketika berada di luar, karenanya menyebabkan Negara tersebut mengalami krisis pangan.

Oleh sebab Pemerintah Negara Sierra Leone tidak dapat mengatasi permasalahan pangan yang terjadi karena warganya tidak dapat melakukan aktifitas bercocok tanam. Melihat kondisi tersebut, WFP dan FAO mendukung Pemerintah Sierra Leone untuk menjembatani kesenjangan yang ada antara produksi pangan lokal dan permintaan nasional (Thomas A. R., 2016).

WFP sendiri sebenarnya sudah ada di Sierra Leone sejak tahun 1968, yang mana pekerjaan mereka berfokus pada mengatasi adanya kekurangan gizi pada kelompok rentan dan mendukung segala strategi Pemulihan Ebola Nasional Pemerintah, yang bermanfaat untuk “membangun kembali dengan lebih baik”. WFP bertujuan untuk membantu Negara dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok dan nutrisi dari kelompok rentan, hal ini termasuk anak-anak yatim piatu dan korban selamat, yang mana banyak diantara mereka yang terkena masalah kesehatan kronis (WFP, Sierra Leone). Sebelumnya WFP dan FAO melakukan survei pada 800 warga di wilayah Kailahun dan Kenema menemukan bahwa setidaknya dari beberapa keluarga tertentu terdapat pemangkasan asupan makanan dari 3 kali makan menjadi 1 kali makan dalam sehari, padahal seharusnya wilayah tersebut merupakan daerah penghasil utama pangan (Movanita, 2014).

Dalam hal mengatasi krisis pangan ini WFP bekerjasama dengan pemerintah Sierra Leone, agar WFP ini dapat bergerak dengan bebas di Negara

tersebut dengan adanya ijin dari pemerintah Negara itu sendiri dalam melakukan kegiatannya, melalui dana yang didapatkan dari sumbangan Negara-negara yang tergabung di dalam PBB maupun di WFP itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis membuat rumusan masalah yang dialami oleh Sierra Leone sebagai berikut:

”Bagaimana peran *World Food Programme* dalam menangani krisis pangan di Negara Sierra Leone?”

## **C. Konsep**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Konsep Organisasi Internasional. Organisasi Internasional secara sederhana didefinisikan sebagai:

*“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.”*

(Sebuah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara, umumnya berlandaskan pada suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang dijawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf yang dilakukan secara berkala).

Menurut pengertian di atas, organisasi internasional memiliki tiga unsur, yakni:

1. Keterlibatan Negara dalam suatu pola kerjasama;
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala;
3. Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*).

Dalam bentuk pola kerjasama Organisasi Internasional mengalami perkembangan yang pesat, dimana organisasi internasional telah menonjolkan perannya yang bukan melibatkan Negara beserta pemerintahnya saja. Negara tetap merupakan aktor dominan di dalam berbagai bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang semakin bertambah jumlahnya. Dengan demikian organisasi internasional didefinisikan secara lebih lengkap, yakni: “pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari berbagai struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan maupun diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan berbagai fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya berbagai tujuan yang akan diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah dalam negara yang berbeda” (Rudy, 2009, pp. 2-3).

Organisasi Internasional tumbuh oleh adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa guna adanya suatu wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional (Rudy, 2009, p. 4). Jadi secara garis besarnya, organisasi internasional dapat diartikan sebagai seluruh struktur formal dan berkesinambungan yang terbentuk melalui adanya kesepakatan antar anggotanya baik *state* maupun *non-state actors* yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama (Putri, 2015). Dalam menjalankan aksinya, Organisasi Internasional memiliki fungsi dan perannya. Adapun peran dari Organisasi Internasional yakni sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang sebuah kerjasama serta mencegah ataupun mengurangi adanya intensitas konflik (sesama anggota).

2. Sebagai sebuah sarana dalam melakukan perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri dalam melaksanakan setiap kegiatan yang diperlukan (antara lain: kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan guna pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah, dan lain-lain) (Rudy, 2009, p. 27).

Menurut pakar lain seperti, Clive Archer yang dijelaskan di dalam buku Drs. T. May Rudy, menjelaskan bahwa peranan organisasi Internasional itu meliputi (Rudy, 2009, p. 29):

1. Sebagai Instrumen (alat/sarana)  
Organisasi Internasional digunakan oleh negara negara anggotanya untuk mencapai kesepakatan dalam tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena (forum/wadah)  
Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan serta permasalahan permasalahan yang sedang dihadapi, atau bahkan untuk berkonsultasi dan membuat keputusan bersama dengan merumuskan perjanjian-perjanjian internasional (*treaty, agreement, protocol*, dan sebagainya)
3. Sebagai Pelaku (aktor)  
Organisasi Internasional juga dapat menjadi aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan hanya sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya saja.

Sedangkan fungsi dari Organisasi Internasional yakni:

1. Tempat berhimpunnya Negara Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar-negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat bila

- Organisasi Internasional itu INGO (non-pemerintah).
2. Untuk menyusun dan merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.
  3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma maupun rejim-rejim internasional.
  4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (dapat berupa Negara lain yang bukan anggota maupun dengan Organisasi Internasional lainnya).
  5. Penyebarluasan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh sesama anggota (Rudy, 2009, pp. 27-28).

Kemudian Umar Bakry menyebutkan bahwa ia telah mengklasifikasikan Internasional Organization menjadi *Intergovernment Organization* (IGO) dan *Non-Government Organization* (NGO). *Intergovernment Organization* (IGO) merupakan organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara yang berdaulat, yang mana mereka kemudian melakukan pertemuan secara reguler dan memiliki staf yang *fulltime*, dan umumnya memiliki keanggotaan yang bersifat sukarela (Bakry, 1999).

Tujuan utama IGO adalah menciptakan mekanisme bagi penduduk dunia untuk bekerja lebih berhasil bersama di bidang perdamaian dan keamanan, dan juga untuk menangani masalah ekonomi dan sosial. Di era globalisasi ini, IGO telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam sistem politik internasional dan pemerintahan global (Koteen , 2019). IGO dibentuk oleh perjanjian yang bertindak sebagai piagam yang menciptakan grup. Perjanjian dibentuk ketika perwakilan sah (pemerintah) dari beberapa

negara melewati proses ratifikasi, memberikan IGO dengan kepribadian hukum internasional (Githaiga, n.d., p. 2).

Sedangkan *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan Organisasi non-pemerintah, definisi ini mengacu pada *Yearbook of International Organizations* yang mana menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan ataupun memiliki hubungan secara resmi dengan pemerintah di suatu Negara (Hariani, 2017, p. 4). Organisasi non Pemerintah atau INGO merupakan organisasi yang dibentuk oleh kelompok warga negara sukarela, yang diatur di tingkat internasional untuk menangani masalah-masalah yang mendukung barang public, melakukan berbagai fungsi layanan dan kemanusiaan, membawa perhatian warga negara kepada pemerintah, memantau kebijakan dan implementasi program, dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan Masyarakat Sipil di tingkat masyarakat. Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini, dan membantu memantau dan mengimplementasikan perjanjian internasional (Githaiga, n.d., p. 2).

Dalam perkembangannya, IGO dan INGO memiliki peranan yang berbeda dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Le Roy Bennet dalam bukunya *International Organization* yang dijelaskan di dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional* karya Drs. T. May Rudy, menjelaskan peranan dan fungsi dari Organisasi Internasional, namun masih terbatas untuk organisasi antar-pemerintah saja atau IGO, “*Sebagai tambahan dari system negara, organisasi internasional dapat dan memang memainkan sejumlah peran penting. Fungsi utama mereka adalah untuk menyediakan rata-rata kerjasama di antara negara-negara di wilayah-wilayah di mana kerjasama memberikan keuntungan*



*bagi semua atau sejumlah besar negara. Dalam banyak kasus mereka menyediakan tidak hanya tempat dimana keputusan untuk bekerja sama dapat dicapai tetapi juga mesin administrasi untuk menerjemahkan keinginan menjadi tindakan. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan berbagai saluran komunikasi di antara pemerintah sehingga bidang-bidang akomodasi dapat diabdikan dan akses mudah akan tersedia ketika masalah muncul.” (Rudy, 2009, p. 28)*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama organisasi internasional menurut Le Roy Bennet, sebagai sarana kerjasama antar negara dalam daerah-daerah yang mana menyediakan keuntungan bagi sebagian besar negara. Fungsi lainnya adalah sebagai penyedia saluran komunikasi antar pemerintah sehingga akomodasi dapat dieksplorasi dan akses yang lebih mudah akan tersedia untuk menangani berbagai permasalahan yang ada.

Dari penjelasan tersebut penulis menjelaskan bahwa WFP berada dalam naungan PBB dan memiliki hubungan khusus dengan FAO yang dapat dikategorikan sebagai sebuah IGO, yang mana WFP merupakan sebuah organisasi pangan terkemuka yang mengacu pada kerjasama sosial, meskipun ia terikat oleh berbagai Negara, namun pergerakannya tetap bebas sesuai dengan tujuannya, dan keberadaannya tidak akan menjadi ancaman ataupun membahayakan suatu Negara karena, organisasi ini merupakan program pangan yang dibuat untuk kesejahteraan manusia di berbagai belahan dunia. Penulis akan menjelaskan peran dari WFP sebagai sebuah IGO dengan menggunakan konsep OI ini, dengan mengacu pada peran dan fungsi dari konsep OI tersebut, penulis akan menganalisis peran WFP melalui peran dan fungsi konsep tersebut.

#### D. Argumen Utama

Dilihat dari latar belakang masalah dan konsep OI tersebut, penulis ingin menyampaikan bahwa:

Sebagai sebuah OI yang dikategorikan sebagai IGO yang berada dibawah naungan PBB, WFP menjalankan perannya sebagaimana konsep OI tersebut, yakni

1. Sebagai Instrumen (alat/sarana)

WFP digunakan sebagai alat untuk memberikan solusi kepada pemerintah Sierra Leone dalam menghadapi masalah krisis pangan di Negara tersebut, hal ini berkaitan dengan SDGs 2 untuk menuju *Zero Hunger* 2030 mendatang. WFP juga menjadi fasilitator komunikasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai jenis LSM yang ada di dunia untuk melakukan kerjasama dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Negara tersebut.

2. Sebagai Arena (forum/wadah)

WFP sebagai tempat berkumpulnya berbagai organisasi lainnya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Sierra Leone. WFP bekerja sama dengan LSM atau organisasi internasional lainnya untuk mencari solusi agar Sierra Leone terbebas dari krisis pangan. Solusi tersebut yakni menggunakan proyek PRRO, sebagai program untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Sierra Leone

3. Sebagai Pelaku (aktor)

Dalam mencapai tujuannya, WFP sebagai pelaku atau aktor yang menggerakkan programnya sendiri melalui kegiatan sosial kemanusiaan. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh WFP dalam proyek PRRO itu adalah dengan *Home Grown School Feeding, Food for Work*, yang berguna untuk memperbaiki gizi masyarakat Sierra Leone.

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan maupun fenomena yang dijadikan sebagai topik kajian utama berdasarkan temuan data yang ada di lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi pustaka, yang mana bahan yang akan diteliti merupakan bahan-bahan yang sudah ditulis dan diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet, dan media-media lainnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan, penulis membagi karya tulis ini kedalam lima bab yang diantaranya:

Bab I Pendahuluan, penulis yang berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori/konsep, tujuan penelitian, metode penelitian, argument utama, serta sistematika penulisan;

Bab II penulis akan membahas mengenai gambaran umum WFP itu sendiri mulai dari sejarah berdirinya, strategi perusahaan, struktur organisasi sampai tujuan hingga sumber pendanaan dari WFP itu sendiri;

Bab III penulis akan membahas tentang terjadinya kasus krisis pangan di Sierra Leone tahun 2014, mulai dari krisis pangan yang terjadi sebelum ebola maupun setelah ebola di Sierra Leone, proses penyebaran virus dimulai dari bagaimana Sierra Leone mengalami Ebola, langkah pemerintah Sierra Leone dalam menangani penyebaran virus, sampai krisis pangan yang terjadi karena dampak dari Ebola tersebut;

Bab IV penulis kemudian membahas tentang Peran dari WFP dalam menangani krisis pangan akibat dari penyebaran virus ebola di Negara Sierra Leone sesuai dengan konsep yang digunakan;

Bab V penulis akan menuliskan kesimpulan yang berasal dari pembahasan sebelumnya untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan.